

## R I N G K A S A N

### **IMPLEMENTASI ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT 2004 PADA REGULASI BIDANG PERDAGANGAN YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DALAM KERANGKA UU NO. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

(2006, 27 halaman)

**Jani Purnawanty**

Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60284  
Tel. 031-5023515, 5023252 Fax. 031-5020454

Dibiayai oleh DIPA PNB Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2006  
Nomor S.K. Rektor 4017/J03/PP/206 Tanggal 2 Juni 2006

Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan kesepakatan AFTA yang berkaitan langsung dengan potensi perdagangan di Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Jawa Timur pada khususnya, menganalisa implementasi kesepakatan AFTA di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya, menjelaskan peran dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam implementasi kesepakatan AFTA, mengidentifikasi peluang yang diperoleh dan kendala yang dihadapi dunia bisnis dengan diterapkannya AFTA di Jawa Timur, dan mencari solusi yang tepat bagi maksimalisasi potensi bisnis di wilayah Jawa Timur sehubungan dengan diterapkannya AFTA .

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah yuridis empiris, yaitu meneliti aspek yuridis pada permasalahan empiris. Permasalahan empiris yang diteliti adalah implementasi kesepakatan AFTA pada regulasi bidang perdagangan di Jawa Timur. Ranah penelitian ini adalah tataran empiris yang mempertanyakan implementasi, untuk itu penggalian bahan penelitian diarahkan pada perolehan wujud riil implementasi kesepakatan AFTA dalam peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berkaitan dengan masalah implementasi, digali pula data tentang:

- a. kualitas implementasi yang menyangkut kesesuaian dan kelengkapan substansi pengaturan;
- b. hal-hal apa saja yang tidak atau belum diakomodasi pada peraturan perundang-undangan;
- c. kesulitan dan kendala yang menjadi latar belakang kinerja peraturan perundang-undangan.

Pembentukan ASEAN pada awalnya sangat diwarnai dengan motivasi politik, yaitu sebagai cara bagi kelima negara pendiri ASEAN untuk mempersatukan diri karena kedekatan geografis, historis, dan kesamaan tujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Baru pada KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976 diletakkan skenario peningkatan kerja sama regional melalui kerja sama ekonomi. Setelah KTT ASEAN di Bali, diesepakati banyak perjanjian-perjanjian internasional dalam kerangka ASEAN di bidang ekonomi, seperti the ASEAN Industrial Projects (AIP), the ASEAN Preferential Trading Arrangement (PTA), the

ASEAN Industrial Complementation Scheme (AIC), atau the ASEAN Industrial Joint Ventures (AIJV).

The ASEAN Industry Cooperation (AICO) Scheme adalah program kerja sama bidang industri di kawasan ASEAN terbaru yang dijalankan untuk meningkatkan aktifitas industri dan manufaktur di kalangan perusahaan-perusahaan yang berbasis di ASEAN. Pengaturan tentang akses pasar terhadap AICO Product berdasarkan the AICO Scheme, digantungkan pada bentuk keluarannya, yaitu (a) finished products yang dalam the AICO Arrangement disebut dengan the AICO Final Product; (b) intermediate parts yang dalam the AICO Arrangement disebut dengan AICO Intermediate Products; (c) components or raw materials yang dalam AICO Arrangement disebut dengan AICO Raw Materials. Sedangkan kriteria perusahaan yang layak untuk membentuk the AICO Arrangement adalah (a) be incorporated and operating in any ASEAN country; (b) have a minimum 30% national equity; dan (c) undertake resource sharing/pooling, or industrial complementation or other industrial cooperation activities that are accepted by the participating country. Sedangkan tipe perusahaan yang dapat berpartisipasi adalah "the new scheme will initially be applicable to manufacturing companies only. Enabling provisions has been incorporated in the draft agreement of AICO Scheme to expand the scheme to other sectors at a later stage."

Ternyata AFTA tidak memiliki aturan khusus tentang perdagangan. Sektor yang diatur dalam AFTA yang berkaitan dengan sektor perdagangan adalah sektor industri. Dalam sektor industri, secara konkrit dan praktis pengaturannya dimuat dalam the AICO Scheme yang pada intinya mengupayakan peningkatan kinerja di sektor industri dan manufaktur di kawasan ASEAN. Indonesia telah melibatkan diri dengan membangun the AICO Arrangement sebanyak 50 perjanjian di antara 129 perjanjian yang ada dalam naungan the AICO Scheme. Mengingat tidak terdapat pengaturan AFTA yang khusus tentang perdagangan maka implementasi secara regional pun tidak tersedia. Sejauh ini, pelaku usaha nasional yang memanfaatkan proyek AICO adalah perusahaan nasional berskala besar, mempunyai jaringan produksi dan pemasaran internasional, dan mempunyai parent, dan bergerak pada sektor industri yang pada umumnya dimiliki oleh setiap negara --artinya bukan sektor yang berorientasi pada pemenuhan khas industri domestik saja-- tentu lebih siap memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh the AICO Arrangement.

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT 2004 PADA REGULASI BIDANG PERDAGANGAN YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DALAM KERANGKA UU NO. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

(2006, 27 halaman)

**Jani Purnawanty**

Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60284  
Tel. 031-5023515, 5023252 Fax. 031-5020454

Dibiayai oleh DIPA PNB Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2006  
Nomor S.K. Rektor 4017/J03/PP/206 Tanggal 2 Juni 2006

Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan kesepakatan AFTA yang berkaitan langsung dengan potensi perdagangan di Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Jawa Timur pada khususnya, menganalisa implementasi kesepakatan AFTA di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya, menjelaskan peran dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam implementasi kesepakatan AFTA, mengidentifikasi peluang yang diperoleh dan kendala yang dihadapi dunia bisnis dengan diterapkannya AFTA di Jawa Timur, dan mencari solusi yang tepat bagi maksimalisasi potensi bisnis di wilayah Jawa Timur sehubungan dengan diterapkannya AFTA.

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah yuridis empiris, yaitu meneliti aspek yuridis pada permasalahan empiris. Ranah penelitian ini adalah tataran empiris yang mempertanyakan implementasi, untuk itu penggalian bahan penelitian diarahkan pada perolehan wujud riil implementasi kesepakatan AFTA dalam peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pembentukan ASEAN pada awalnya sangat diwarnai dengan motivasi politik, yaitu sebagai cara bagi kelima negara pendiri ASEAN untuk mempersatukan diri karena kedekatan geografis, historis, dan kesamaan tujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Baru pada KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976 diletakkan skenario peningkatan kerja sama regional melalui kerja sama ekonomi. The ASEAN Industry Cooperation (AICO) Scheme adalah program kerja sama bidang industri di kawasan ASEAN terbaru yang dijalankan untuk meningkatkan aktifitas industri dan manufaktur di kalangan perusahaan-perusahaan yang berbasis di ASEAN. Pengaturan tentang akses pasar terhadap AICO Product berdasarkan the AICO Scheme. the AICO Scheme pada intinya mengupayakan peningkatan kinerja di sektor industri dan manufaktur di kawasan ASEAN. Indonesia telah melibatkan diri dengan membangun the AICO Arrangement sebanyak 50 perjanjian di antara 129 perjanjian yang ada dalam naungan the AICO Scheme. Mengingat tidak terdapat pengaturan AFTA yang khusus tentang perdagangan maka implementasi secara regional pun tidak tersedia. Sejauh ini, pelaku usaha nasional yang memanfaatkan proyek AICO adalah perusahaan nasional berskala besar, mempunyai jaringan produksi dan pemasaran internasional, dan mempunyai parent, dan bergerak pada sektor industri yang pada umumnya dimiliki oleh setiap negara.

**Kata Kunci:** AFTA, AICO Scheme, Industri, Indonesia

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT 2004 ON THE TRADE REGULATION IMPOSED BY THE EAST JAVA PROVINCE GOVERNOR IN FRAME OF UU NO. 32 TH. 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT

(2006, 27 halaman)

**Jani Purnawanty**

Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60284  
Tel. 031-5023515, 5023252 Fax. 031-5020454

Dibiayai oleh DIPA PNB Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2006  
Nomor S.K. Rektor 4017/J03/PP/206 Tanggal 2 Juni 2006

This in to break down the AFTA commitments that have direct impact to trade sector in East Java, to analyze the implementation of AFTA in East Java, to explain the role of Local Governor in term of AFTA implementation, and to seek the solution to maximize the business potential in East Java relating to AFTA. Approach applied in this research is juridical empiric which aiming to study the juridical aspect on empirical problem. Scope of this research is questioning the implementation which directed to acquire the riel implementation of AFTA in East Java.

Recognizing that the ever changing world economic environment continues to pose new challenges as well as provide new opportunities, ASEAN needs to adjust its program for economic cooperation. The conclusion of the Uruguay Round negotiations; the implementation of the WTO commitments by ASEAN member countries; the implementation of the CEPT Scheme for AFTA and the eventual implementation of the APEC Action Agenda on trade and investment liberalization and facilitation; has and will change the global economic landscape including ASEAN. ASEAN also realized that some of the parameters upon which its existing industrial cooperation programs were designed are no longer valid to-day. The ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme aims to promote resource-sharing and increase the competitive position of ASEAN's manufacturing industries by means of production integration across borders facilitated by a tariff preferential rate of no more than 5 percent. The AICO Agreement does not serve as a legal entity but merely an "umbrella association" under the scheme wherein the output of the participating companies will enjoy a preferential tariff rate in the range of 0-5%. Within the AICO Agreement, the coverage should involve not only the physical movement of products between the participating companies and countries but also resource sharing/pooling or industrial complementation.

Indonesia provides facilities and involved in 50 agreement among 129 agreement conducted under the AICO Scheme. Considering there is no specific regulation on trade, therefore particular regulation on trade also cannot be issued by the Governor of East Java. The Indonesian business persons who can take benefit of the AICO Scheme are corporation in large scale, owning world wide network, and having parent corporate outside Indonesia, and serve in industrial sector owns by each countries.

**Key Words:** AFTA, AICO Scheme, Industry, Indonesia